

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan yang selalu mengikuti perkembangan jaman yang selalu bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Di jaman ini, pemangunan diseluruh sektor dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat melalui kualitas dan pelayanannya. Sama halnya seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 pasal 1 angka 1) yang memiliki tujuan memberikan manfaat perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat, serta memperoleh keuntungan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 pasal 7 huruf a, b dan c). Selain itu BUMD merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri, dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tujuan BUMD tersebut di atas, penulis mencoba mengambil salah satu contoh jenis usaha yang dimiliki oleh BUMD, yaitu

Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik BUMD yang bergerak dalam distribusi penyediaan air bersih kepada masyarakat. Mengingat kebutuhan akan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang kemudian menjadi suatu tuntutan dalam hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat telah memahami arti penting air bersih bagi kehidupan masyarakat. Selain sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat, PDAM juga memiliki tujuan lain yang tidak kalah penting sebagaimana perusahaan berjalan semestinya. Tujuan tersebut adalah menumpuk kekayaan atau mencari laba. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi tuntutan dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) dan juga untuk PDAM sendiri dalam hal pembiayaan perusahaan. Untuk dapat melaksanakan semua tujuan yang hendak dicapai, perusahaan haruslah bekerja maksimal agar kualitas perusahaan baik. Untuk melihat kualitas tersebut, dapat dilihat dari sejauh mana kinerja kerja perusahaan tersebut.

Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai. Hiroyudha (2007:6) mengutip pernyataan Gordon Robertson tentang definisi pengukuran kinerja sebagai berikut: “Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.”

Kinerja kerja merupakan penilaian untuk melihat berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam perusahaan Daerah Air Minum, penilaian kinerja didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM

1. Pasal 3 (ayat 1 huruf a,b,c,d dan e) yang berbunyi

Tingkat keberhasilan PDAM adalah :

- a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
- b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
- c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
- d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
- e. Tidak baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.

Namun penilaian tingkat keberhasilan aspek keuangan terdiri dari :

- (a)Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 33,75;
- (b)Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 27 sampai dengan 33,75;
- (c)Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 20,25 sampai dengan 27;
- (d)Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 13,5 sampai dengan 20,25;
- (e)Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 13,5.

2. Pasal 3 ayat 2 huruf a yang berbunyi :

“Bobot Untuk Aspek Keuangan Adalah 45”

3. Pasal 3 ayat 3 huruf a yang berbunyi:

Indikator aspek keuangan terdiri dari :

- a. Rasio laba terhadap aktiva produktif;
 - b. Rasio laba terhadap penjualan;
 - c. Rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar;
 - d. Rasio hutang jangka panjang terhadap total hutang;
 - e. Rasio total aktiva terhadap total hutang;
 - f. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi;
 - g. Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo;
 - h. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air;
 - i. Jangka waktu penagihan piutang;
 - j. Efektifitas Penagihan
4. Pasal 3 ayat 4 huruf a dan b) tentang perbaikan indikator yang berbunyi :
- a. Peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif
 - b. Peningkatan rasio laba terhadap penjualan
5. pasal 3 ayat 5 huruf a) yang berbunyi :
- a. Jumlah nilai indikator maksimum pada aspek keuangan 60

Untuk dapat menilai kinerja keuangan tersebut, penulis mencoba untuk melakukan penelitian pada salah satu badan usaha milik daerah Kabupaten Kupang, yaitu pada PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang. Penulis mencoba menilai kinerja kerja PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan. penelitian ini hanya berfokus pada kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lontar Kabupaten Kupang. Penilaian kinerja tersebut akan berpegang pada kinerja keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.

Namun, untuk mengetahui kinerja tersebut tidaklah lepas dari laporan keuangan yang disediakan perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan pada suatu periode tertentu, dengan mengetahui kondisi keuangan tersebut, maka akan diketahui pula hasil kinerja PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba/rugi dapat memberikan informasi kepada perusahaan maupun pihak lain mengenai hasil dari kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Berikut gambaran laporan keuangan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang selama periode 2013, 2014 dan 2015.

Tabel 1.1
Data gabungan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Lontar Kabupaten Kupang
Periode 2013 s/d 2016
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Aktiva Lancar	13.621.414.362	14.124.490.952	19.148.486.184
2	Aktiva Tetap	18.742.021.506	21.663.240.446	17.638.470.827
3	Kewajiban Lancar	2.984.790.187	2.421.541.645	13.807.062.692
4	Kewajiban Tidak Lancar	9.738.097.785	12.045.421.384	5.320.053.269
5	Modal	19.640.547.896	21.320.768.369	27.786.477.312
6	Penjualan Air	27.444.276.559	34.791.626.300	33.615.635.407
7	Biaya Operasional	26.924.416.728	32.706.727.353	38.980.200.654
8	Laba Bersih	1.758.291.971	2.975.859.635	2.694.331.903

Sumber : laporan keuangan (Neraca dan R/L, tahun 2014,2015,dan 2016)

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa perkembangan keuangan pada PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang selama tiga (3) tahun selalu mengalami perubahan baik dari total aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang (tidak lancar), modal, penjualan air, maupun biaya operasional. Dari tahun 2013-2015 total aktiva lancar terus meningkat, total aktiva tetap pada tahun 2013-2014 meningkat, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Total kewajiban lancar mengalami penurunan dari pada tahun 2013-2014, namun mengalami kenaikan pada tahun 2014 yang dikarenakan jumlah hutang yang semakin meningkat, total kewajiban tidak lancar pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun 2015. Total aktiva yang dimiliki perusahaan terus bertambah dari tahun 2013-2015. Total penjualan air dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun 2015. Total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin meningkat dari tahun 2013-2015. Total laba bersih dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2015, hal ini dikarenakan total penjualan air yang menurun pada tahun 2015 dan biaya operasional yang terlalu tinggi pada tahun 2015.

Walaupun adanya laporan keuangan yang menunjukkan perolehan laba, namun belum bisa diperkirakan rasio keuangan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang baik adanya. Rasio keuangan tidak hanya dilihat dari neraca dan laporan laba/rugi saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kinerja keuangan lainnya. Untuk mengetahui

kondisi kinerja dari PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, maka harus dianalisis dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lontar selama tahun 2013, 2014 dan 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lontar Kabupaten Kupang berdasarkan analisis rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran agar lebih memaksimalkan kinerja keuangannya melalui alat ukur analisis rasio keuangan.
- b. Bagi pihak lain, dapat menambah pengetahuan sehingga dijadikan bahan acuan atau referensi dalam penelitian lebih lanjut.